

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN,
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
(STUDI EMPIRIS PADA OPD KABUPATEN BADUNG)**

**I Kadek Kumara Ari Wijaya¹
Ni Putu Trisna Windika Pratiwi²**

^{1,2}Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
e-mail: kumara.ari.wijaya99@gmail.com

ABSTRACT

Regional Government Financial Reports (LKPD) are intended to fulfill the general purpose of financial reporting and financial reports produced by local governments will later be used in decision making by the parties concerned. The purpose of this study was to examine the effect of implementing government accounting standards, human resource competence, the use of information technology, and government internal control systems on the quality of financial reports at OPD Badung Regency. The population used in this study were 3026 employees who worked in 33 OPDs in Badung Regency. Determination of the sample using purposive sampling method in order to get 99 people as the sample. After the instrument test and classical assumption test were carried out, the data analysis was then carried out using multiple linear regression analysis, determination, t test, and F test. internal government has a positive and significant effect on the quality of local government financial reports of Badung Regency.

Keywords: *Implementation of Governmental Accounting Standards, Human Resources Competence, Utilization of Information Technology, Government Internal Control Systems, Quality of Financial Statements*

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip tepat waktu dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. Setelah menyusun laporan keuangan pemerintah kemudian akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan setelah itu akan disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum. Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah nantinya akan dipergunakan dalam pengambilan keputusan oleh pihak yang bersangkutan. Kualitas LKPD setiap tahunnya akan mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah

dapat ditingkatkan dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Karena Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan landasan bagi pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang bertujuan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini dijelaskan dalam PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (dalam pengantar SAP). Adapun unsur-unsur pembentuk yang meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan terdiri dari: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami.

Adapun fenomena pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu hal yang menarik untuk dibahas lebih lanjut. Seperti di kabupaten Badung memperoleh opini WTP atas LKPD tahun 2017 dari BPK. Namun, meskipun opini yang diberikan BPK kepada LKPD kabupaten Badung berupa opini WTP tetapi berdasarkan dari Laporan Hasil Pengawasan (LHP) semester II perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) provinsi Bali yang terbit pada tahun 2018, menemukan permasalahan umum yang ditemukan di pemerintah kabupaten Badung yaitu didalam proses penyusunan laporan keuangan, beberapa kelemahan pengendalian internal diidentifikasi - ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan. Selain temuan permasalahan pada proses penyusunan LKPD, temuan lain yang didapat yaitu hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dilakukan atas permintaan dari Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka membantu penyidikan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi di kabupaten Badung sebesar Rp 952.200.000,00. Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas kasus dugaan tindak pidana korupsi yang material adalah berupa pengambil alihan aset negara dengan pensertifikatan tanah, penyelewengan pengadaan barang dan jasa, serta bantuan sosial dan hibah dari pemerintah yang tidak disetor dan digunakan langsung untuk keperluan pribadi. Kerugian atas kasus ini mengindikasikan bahwa masih kurang efektifnya pengendalian internal pada pusat pemerintahan di kabupaten Badung sehingga masih ada celah terjadinya kecurangan, penyelewengan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. (Sumber: <http://bpkp.go.id>)

Dengan latar belakang masalah yang diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Badung?

2. Bagaimanakah pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Badung?
3. Bagaimanakah pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Badung?
4. Bagaimanakah pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Badung?

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan tentang standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan pengendalian internal pemerintah sebagai langkah perbaikan bagi pemerintahan di masing-masing daerah dalam kualitas laporan keuangan yang dihasilkan terutama pada daerah Kabupaten Badung.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Agensi diajukan oleh Alchian dan Demsetz tahun 1972 dan Jensen dan Meckling tahun 1976. Teori Agensi menjelaskan perilaku suatu perusahaan dari perspektif berbagai kontrak antara berbagai pihak. Menurut Lane (2007) teori keagenan dapat diterapkan pada organisasi sektor publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan pemberi amanah (*principal*) atau dalam hal ini pemerintah pusat dan pemegang amanah (*agent*) atau dalam hal ini masing-masing Dinas pada OPD untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) atau pemerintah pusat yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Penelitian mengenai pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan telah dilakukan oleh Abdullah dan Akib (2018), dan Inapty dkk (2016) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

H1: Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Badung.

Moetheriono (2009) mendefinisikan kompetensi sebagai kualitas dasar seseorang, yang menunjukkan bagaimana berpikir, bertindak, bertindak, menarik kesimpulan yang

dapat dibuat, dipertahankan oleh seseorang untuk jangka waktu tertentu. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen terpenting dalam sebuah organisasi, sehingga pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Penelitian mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan telah dilakukan oleh Mahardini dan Miranti (2018), Tawaqal, Suparno (2017) menunjukkan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, ini menunjukkan semakin kompeten sumber daya manusianya.

H2: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Badung.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu cara untuk mendukung keberhasilan misi dalam melaksanakan visi dan misi pengelolaan keuangan yang baik. Melalui teknologi informasi ini dapat membantu pegawai pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah dan memudahkan dalam pengolahan data keuangan secara sistematis. Penelitian mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap kualitas laporan keuangan telah dilakukan oleh Pangestu, dkk (2019), Darwis dan Meliana (2020) menunjukkan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan teknologi informasi memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

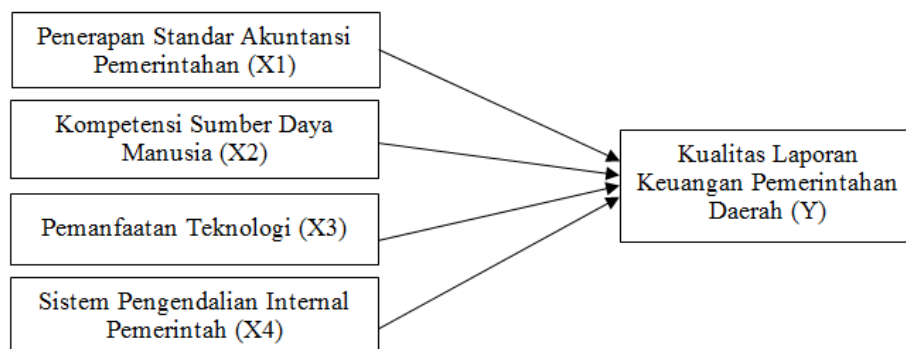
H3 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Badung.

PP No 60 Tahun 2008 tentang SPIP menjelaskan bahwa proses yang sangat tidak terpisahkan aktivitas harus dilakukan terus menerus oleh pimpinan semua karyawan untuk memastikan kepercayaan yang memadai pada organisasi untuk mencapai tujuan melalui pelaporan keuangan yang baik, menjaga aset pemerintah, efektif, efisien, karena dia Kepatuhan dengan hukum dan peraturan. Penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan telah dilakukan oleh Ikyarti dan Aprila (2019), Widari dan Sutrisno (2017) menunjukkan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

H4 : Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Badung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbentuk asosiatif. Menurut Sugiyono (2013: 55), penelitian asosiatif bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Kerangka penelitian ini seperti gambar berikut ini:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh seluruh OPD yang ada pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung yang terdiri dari 33 OPD. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017:91).

Sampel penelitian ini diambil menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pejabat struktural seperti kasubbag keuangan, bendahara umum, dan bagian penyusunan program dan pelaporan di masing-masing Dinas pada OPD.
2. Memiliki minimal satu tahun masa kerja selama periode pelaporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian validitas dan reliabilitas masing-masing indikator variabel memiliki nilai koefisien korelasi berada di atas 0,30 dan koefisien alpha (α) lebih besar dari 0,6 dengan demikian semua instrumen tersebut adalah valid dan reliabel, sehingga layak dijadikan instrumen penelitian.

Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran persepsi responden terhadap pernyataan yang diberikan dalam instrumen penelitian tentang variabel-variabel yang diteliti. Hasil statistik deskriptif pada penelitian ini sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	99	17	55	42,37	7,458
X2	99	6	30	23,11	4,465
X3	99	20	40	30,83	4,697
X4	99	18	45	34,75	5,319
Y	99	17	40	30,95	4,402
Valid N (listwise)	99				

Sebelum dianalisis dengan teknik analisis regresi linier berganda, maka model persamaan regresi harus lolos uji asumsi klasik, dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	3,12522059
Most Extreme Differences	Absolute	0,123
	Positive	0,105
	Negative	-0,123
Kolmogorov-Smirnov Z		1,228
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,098

Hasil uji normalitas pada Tabel 2. memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,098 > 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1 (Constant)	0,287	3,277			
X1	0,116	0,048	0,207	0,550	1,818
X2	0,229	0,108	0,210	0,420	2,381
X3	0,155	0,074	0,135	0,991	1,009
X4	0,458	0,080	0,485	0,574	1,742

Hasil uji heteroskedastisitas seluruh variabel bebas memiliki nilai VIF tidak lebih dari 10 dan mempunyai angka *tolerance* tidak kurang dari 0,1. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dari model regresi yang digunakan.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,835	2,105		2,772	0,007
X1	-0,016	0,029	-0,073	-0,547	0,585
X2	-0,062	0,062	-0,144	-1,003	0,318
X3	-0,010	0,046	-0,023	-0,226	0,821
X4	-0,041	0,046	-0,101	-0,887	0,378

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti pada model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Hasil analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh antara penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Badung. Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,287	3,277		0,087	0,931
X1	0,116	0,048	0,207	2,398	0,018
X2	0,229	0,108	0,210	2,119	0,037
X3	0,155	0,074	0,135	2,089	0,039
X4	0,458	0,080	0,485	5,731	0,000

Berdasarkan Tabel 5. maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,287 + 0,116X_1 + 0,229X_2 + 0,155X_3 + 0,458X_4$$

Besarnya pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Badung adalah sebesar 59,7% sedang sisanya 40,3% dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengujian secara simultan dilakukan dengan menggunakan uji F. Didapat nilai F hitung sebesar 37,339 dengan signifikansi 0,000. Karena signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara serempak penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Badung.

PEMBAHASAN

Hasil pengujian t-test penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Badung dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,116 dan menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,398 dan nilai signifikan uji t sebesar $0,019 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Akib (2018) dan hasil penelitian Inapty, dkk (2016) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil pengujian t-test kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Badung dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,229 dan menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,119 dan nilai signifikan uji t sebesar $0,037 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahardini dan Miranti (2018) dan hasil penelitian Tawaqal dan Suparno (2017) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil pengujian t-test pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Badung dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,155 dan menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,089 dan nilai signifikan uji t sebesar $0,039 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pangestu, dkk (2019) dan hasil penelitian Darwis dan Meliana (2020) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil pengujian t-test sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Badung dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,458 dan menunjukkan nilai t hitung sebesar 5,731 dan nilai signifikan uji t sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ikyarti dan Aprila (2019) dan hasil penelitian Widari dan Sutrisno (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Badung. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Badung. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Badung. Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Badung.

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut di atas, maka disarankan kepada instansi pemerintah yang tergabung dalam OPD Kabupaten Badung, mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan agar selalu melakukan pencatatan sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan pada masing-masing instansi agar lebih mudah untuk melakukan evaluasi. Mengenai kompetensi sumber daya manusia, disarankan agar lebih meningkatkan kompetensi pegawai di bidang akuntansi dengan memberikan diklat-diklat yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi pegawai. Mengenai pemanfaatan teknologi informasi, disarankan agar lebih memperhatikan *hardware* dan *software* yang digunakan pada instansinya masing-masing agar selalu dapat memberikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan konsisten. Mengenai sistem pengendalian internal pemerintah, agar lebih menerapkan sanksi disiplin yang tegas terhadap pegawai yang bekerja tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan instansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwis, H., & Meliana, M. 2020. Pengaruh Penerapan standar akuntansi pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Multiparadigma (JEAMM)*, 1(2).
- Fikri, M. A., Inapty, B. A., & Martiningsih, S. P. 2015. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi empiris pada SKPD-SKPD di Pemprov. NTB). *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*.
- Harnoni. 2016. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Di Kabupaten Kepulauan Anambas). *Jom FEKON Vol. 3 No. 1 (Februari) 2016*.
- Ikyarti, T., & Aprila, N. 2019. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi ISSN*, 9(2), 2019.
- Lane, Keller Kevin. 2007. *Manajemen Pemasaran Edisi 12*. Jakarta: PT. Indeks.

- Mahardini, N. Y., & Miranti, A. 2018. Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. *JAK (Jurnal Akuntansi): Kajian Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 22-32.
- Mildamayanti, M., Abdullah, M., & Akib, M. 2018. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Penerapan standar akuntansi pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *JPEP (Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan)*, 3(2).
- Pangestu, M. E. 2019. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Dan Penerapan standar akuntansi pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ponorogo. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(2), 109-119.
- Pujanira, P., & Taman, A. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 6(2), 14-28.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba empat, edisi 4, buku 2.
- Sudiaranti, N. M., Ulupui, I. G. K. A., & Budiasih, I. G. A. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta
- Wardani, D. K., & Andriyani, I. 2017. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan standar akuntansi pemerintahan, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 88-98.
- Widari, L., & Sutrisno, S. 2017. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kompetensi sumber daya manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen)*, 5(10), 117-126.